

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut *Corruption Perfection Index* (CPI) 2022, dari 180 negara Indonesia berada di peringkat 110 dalam tingkat korupsi. Tidak hanya itu, sesuai dengan pernyataan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*, Indonesia berada pada peringkat ke-3 di Asia-Pasifik sebagai negara dengan jumlah *fraud* sebanyak 25 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam menghentikan penipuan. Minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan membuat respon terhadap praktik korupsi cenderung lambat dan menjadi lebih buruk.

Fraud merupakan perilaku curang untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok tetapi merugikan pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari, *fraud* masih menjadi masalah utama. *Fraud* dapat ditemukan di semua lapisan masyarakat, dari golongan atas hingga bawah, dan dari usia dini hingga produktif. Tidak ada perusahaan atau organisasi yang benar-benar aman dari *fraud*.

Menurut Murdock (2018), pelaku *fraud* bisa berasal dari semua golongan (atas maupun bawah). Akibatnya *fraud* dapat mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara. Maka dari itu, diperlukan

kepedulian, kesadaran, dan kewaspadaan bagi setiap individu terhadap kemungkinan kecurangan di tempat kerja (Melani & Sudiby, 2020).

Menurut ACFE, penipuan menyebabkan kerugian sekitar 5% dari pendapatan kotor suatu perusahaan. Kemudian *Report to The Nations 2018* menyatakan penyalahgunaan asset merupakan penipuan yang paling sering sebesar 89%, diikuti oleh korupsi sebesar 38%, dan penipuan laporan keuangan sebesar 10%..

Di Indonesia, korupsi merupakan jenis penipuan yang paling umum sebesar 69,9%. Dilanjut penyalahgunaan aset sebesar 20,9%, dan kecurangan laporan keuangan sebesar 9,2% dengan kerugian tertinggi di bawah 10 juta rupiah. Meskipun ada kasus yang paling sedikit di bagian lain, tetapi kerugian terbesar mencapai lebih dari Rp10 miliar.

Salah satu industri yang paling rentan terhadap kecurangan di dunia adalah manufaktur (ACFE, 2019). Kasus kecurangan ini mencapai 8,8 persen dari total kerugian, dengan kerugian rata-rata \$194,000. Makanan dan minuman adalah subsektor manufaktur yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kemenperin, 2019). Akibatnya, kecurangan dapat terjadi di bidang perusahaan *Consumer Goods*.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, atau TPS Food, terlibat dalam kasus rekayasa laporan keuangan pada tahun 2017. Kasus ini terjadi karena dua anak

perusahaan PT TPS Food, PT Indo Beras Unggul dan PT Jati Sari Rezeki, melakukan kesalahan dalam menjual beras mereka. Akibatnya, beras premium yang dilabelkan tidak diproduksi sesuai dengan keterangan label meskipun beras yang disubsidi oleh petani telah diproses. Atas kejadian tersebut, saham AISA turun secara drastis sehingga manajemen berusaha untuk memperindah laporan keuangan tahun 2017. Pada tahun 2018, pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) meminta laporan keuangan KAP Aryanto Amir Jusuf dan Mawar diselidiki kembali. Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (EY) melakukan penyeledikan kembali. Menurut laporan hasil investigasi, auditor keuangan menggunakan pencatatan keuangan yang berbeda selama audit tahun 2017. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *overstatement* sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap TPS Food Grup. Selain tiga akun tersebut, pada akun penjualan juga terdapat *overstatement* sebesar 662 miliar dan pada akun EBITDA Entitas sebesar 329 miliar. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa dana dari berbagai program TPS Food Group telah dialihkan ke pihak terafiliasi dengan manajemen lama sebesar 1,78 triliun tanpa memberikan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan. Hasilnya, para pemegang saham menyetujui pada Oktober 2018 dan memutuskan untuk membentuk manajemen baru (Christian & Stella, 2021).

Tidak hanya di Indonesia, negara lain juga mengalami kasus *fraud* di beberapa tempat kerja. Terdapat beberapa kasus kecurangan keuangan terbesar sepanjang sejarah. Salah satu kasus kecurangan paling terbesar terjadi di perusahaan Worldcom.

Worldcom, perusahaan telekomunikasi kedua terbesar di Amerika, didirikan oleh Murray Waldron, William Rector, dan investor awal Bernard Ebbers pada tahun 1983. Pada tahun 1989, Worldcom memiliki kode saham Wcom di bursa Nasdaq. Di tahun 1990, Worldcom berkembang pesat dengan 73.000 karyawan di seluruh dunia. Akan tetapi, pada awal tahun 2000 Worldcom mengalami penurunan pendapatan serta semakin meningkatnya utang perusahaan. Hal tersebut berdampak pada nilai pasar saham yang semula sekitar \$150 miliar pada Januari 2000 menjadi \$150 juta pada Juli 2002. Dengan kondisi tersebut, para eksekutif dan manajemen memerlukan cara untuk membuktikan kepada direksi dan pemegang saham apabila Worldcom masih layak secara finansial.

Terdapat dua cara yang dilakukan untuk memanipulasi laporan keuangan. Pertama, perusahaan mencatat pengeluaran sebagai pemasukan atau disebut dengan "*line cost*". Biaya jaringan yang telah dibayarkan ke pihak ketiga dibebankan ke rekening modal yang seharusnya dibebankan ke dalam laporan laba rugi. Kedua, perusahaan mencatat pada entri akun palsu yang diakui sebagai "pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi" agar dapat

meningkatkan pendapatan. Dengan cara tersebut perusahaan berhasil memanipulasi laba sebesar \$2 miliar.

Tidak hanya itu, para manajemen Worldcom mengubah asumsi terhadap akun piutang dagang. Manajemen mengabaikan daftar nasabah yang belum membayar atau mungkin tidak membayar. Oleh karena itu, ada asumsi bahwa semakin sedikit tagihan yang tidak dapat dikumpulkan perusahaan, semakin besar laba yang diharapkan. Ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi, dan manajemen puncak berperan sebagai aktor utama dalam kasus kecurangan.

Agar kasus TPS Food Grup dan Worldcom tidak terjadi kepada perusahaan lain, maka diperlukan tindakan pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan (Isniawati et al., 2022). Tujuan dari pencegahan kecurangan, yaitu mengidentifikasi kegiatan yang menimbulkan peluang kecurangan, mempersulit pelaku kecurangan, dan mencegah terjadinya kerugian di perusahaan.

Pengendalian internal, budaya organisasi, kepatuhan terhadap peraturan akuntansi, *whistleblowing system*, sistem informasi akuntansi, dan moralitas adalah komponen yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* berdasarkan beberapa penelitian. Namun, ada perbedaan pendapat tentang beberapa temuan

penelitian, jadi peneliti akan memilih variabel pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas individu untuk penelitian.

Salah satu faktor untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah pengendalian internal. Pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan bagian penting dari kegiatan manajemen dasar (COSO, 2013). Pengendalian internal harus dilakukan secara rutin untuk memastikan keandalan laporan keuangan, menjaga aset, dan mematuhi kebijakan manajemen perusahaan (Dwiyanti et al., 2022).

The Commission on Auditor's Responsibilities yang dibentuk oleh AICPA di tahun 1978, merekomendasikan bahwa manajemen perusahaan harus memiliki pengendalian internal untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal. Kemudian di tahun 1987, *Treadway Comission* yang bertanggung jawab untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan, menyarankan bahwa perusahaan harus meningkatkan pengendalian internal. Pada September 1992, COSO memperbarui konsep struktur pengendalian internal menjadi struktur pengendalian internal yang terintegrasi atau dikenal sebagai *Internal control-integrated framework*. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai acuan struktur pengendalian internal di Indonesia dalam standar profesional.

Dalam pelaksanaan strategi pencegahan kecurangan diperlukan pengendalian internal yang efektif karena terdapat hal-hal yang memperlemah pengendalian internal. Hal tersebut sesuai dengan kasus kecurangan yang terjadi di Worldcom. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan dapat digunakan untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Anggoe & Reskino (2023) memberikan bukti bahwa variabel pengendalian internal memiliki efek positif yang signifikan. . . Ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian internal yang lebih baik di suatu perusahaan berkorelasi positif dengan tingkat pencegahan kecurangan. Disebabkan terdapat pengendalian internal sehingga karyawan dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan semua operasional perusahaan (Dwiyanti et al., 2022). Pengendalian internal tidak akan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* apabila belum dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak (Jalil, 2018).

Untuk pencegahan *fraud*, sistem kontrol yang kuat juga diperlukan. Terdapat berbagai cara yang dapat dipergunakan untuk sistem kontrol. Metode *hotline* atau *whistleblower system* dianggap cukup efektif sebagai sarana pencegahan *fraud* oleh 22.6% responden. Diikuti oleh kebijakan anti-*fraud* organisasi sebesar 13.8% dan audit laporan keuangan oleh departemen audit internal dan eksternal sebesar 9.6% (ACFE, 2019).

Terdapat beberapa sumber untuk mengungkapkan *fraud*. Menurut Survey *Fraud* Indonesia (SFI) tahun 2016 dan *Report to The Nations 2018* menyatakan bahwa karyawan adalah sumber utama ditemukannya *fraud*. Hal ini sesuai dengan besarnya persentase *whistleblower* sebagai sarana pencegahan *fraud* yang efektif.

Pada penelitian Anggoe & Reskino (2023) mengatakan bahwa upaya pencegahan kecurangan meningkat ketika *whistleblowing system* ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Riau yang mendukung penerapan *whistleblowing system* untuk mencegah kecurangan (Harahap et al., 2022). Selain itu, penelitian Yuniasih et al. (2022) membuktikan bahwa *whistleblowing* yang efektif akan membuat masyarakat dan karyawan perusahaan lebih berani melaporkan kecurangan kepada pihak yang berwenang. Namun, apabila perlindungan untuk pelapor tidak memadai, maka *whistleblowing system* tidak dapat mencegah terjadinya *fraud* karena pelapor khawatir dan tidak ingin berurusan dengan hukum (Sujana et al., 2020). Kemudian penelitian oleh Dwiyanti et al. (2022) menemukan bahwa karyawan dianggap takut apabila tidak terdapat perlindungan atas penyampaian laporan.

Selanjutnya, moralitas individu adalah variabel moderasi dalam penelitian. Hal ini disebabkan moralitas individu yang baik akan melakukan tindakan yang baik dengan mematuhi aturan. Oleh karena itu, manajemen harus membuat program untuk meningkatkan moralitas individu sehingga berdampak

pada tingginya usaha individu dalam mematuhi aturan (Kartadjumena & Indriyati, 2021).

Terdapat beberapa sumber dalam mendeteksi pengungkapan *fraud*. Persentase terbesar berasal dari karyawan sebesar 50.2% dilanjut dengan pihak tanpa menyebut nama sebesar 23.4% hingga pesaing sekitar 2.9%. Hal ini sesuai dengan *Survey Fraud Indonesia 2016* dan *Report to The Nations 2018* menyatakan bahwa laporan karyawan perusahaan menjadi sumber utama pengungkapan *fraud*. Para karyawan yang mengungkap kecurangan pasti memiliki moral yang tinggi dan baik secara pribadi.

Penelitian oleh Kartadjumena & Indriyati (2021) menemukan bahwa moralitas individu dapat mencegah kecurangan bahkan dalam situasi minim pengawasan dari suatu sistem. Menurut Harahap et al. (2022), moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Tidak hanya itu, seseorang yang menjadi *whistleblower* mempunyai penalaran moral yang tinggi sehingga dapat melaporkan kecurangan (Yuniasih et al., 2022).

Peneliti memutuskan untuk menggunakan kerangka penelitian yang berbeda karena masalah dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya sehingga penelitian berjudul

**“Pengaruh Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System*
Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Pemoderasi Moralitas Individu
(Studi Kasus Perusahaan Bidang *Consumer Goods*)”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*?
- b. Apakah terdapat pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*?
- c. Apakah terdapat pengaruh moralitas individu terhadap Pencegahan *Fraud*?
- d. Apakah moralitas individu mampu memoderasi antara Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*?
- e. Apakah moralitas individu mampu memoderasi antara *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*.

- b. Untuk menguji pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*.
- c. Untuk menguji pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud*.
- d. Untuk menunjukkan secara empiris bahwa moralitas individu dapat memoderasi pengaruh antara Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*.
- e. Untuk menunjukkan secara empiris bahwa moralitas individu dapat memoderasi pengaruh antara *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian akan memberikan wawasan dan informasi kepada setiap bisnis, khususnya di bidang *consumer goods* dalam tindakan pencegahan *fraud* melalui variabel pengendalian internal dan *whistleblowing system*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan saat membuat kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pencegahan *fraud*.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan maupun referensi kepada civitas akademik terutama mahasiswa fakultas ekonomi serta sebagai sarana pengembangan pembelajaran.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan sesuai dengan penerapan ilmu yang sudah dipelajari selama kuliah untuk diimplementasikan dalam dunia kerja.

